

## Kebijakan Pemerintah Diputarbalikan Tokoh Tertentu

Sabtu, 23 September 2017 | 9:39

<http://sp.beritasatu.com/home/mendagri-geram-kebijakan-pemerintah-diputarbalikan-tokoh-tertentu/120555>



Tjahjo Kumolo. [Dok.SP]

### Berita Terkait

- Jenguk Korban Penusukan, Mendagri: Negara Tak Boleh Kalah
- Tjahjo Kumolo Sambangi Basuki Di Balai Kota
- Perangkat Desa Diwacanakan Boleh Jadi Pengurus Parpol
- Tjahjo Kumolo: Agung Laksono Ketua DPR Terbaik
- Mendagri Luncurkan Buku "Politik Hukum Pilkada Serentak"

[KLATEN] Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla senantiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan demi kemaslahatan rakyat, telah dan terus menerus dilakukan.

"Kalau Bapak/ Ibu baca koran, nonton televisi, banyak yang diperbuat oleh Bapak Jokowi. Beliau menjalankan amanah rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Forkopimda Kabupaten Klaten, Jateng, Jumat (22/9).

Tjahjo geram apabila ada segelintir pihak yang memutarbalikkan fakta kinerja pemerintah. Selain itu, pihak dimaksud, bahkan menebar kebencian dan kebohongan. "Tokoh-tokoh yang katanya tokoh nasional, tapi berujar kebencian, berujar kebohongan, memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Mari kita berpolitik secara santun," tegasnya.

Menurutnya, berbeda pendapat memang hal yang lumrah. "Mau oposisi boleh, tapi kritiklah dengan baik. Ada etikanya sebagai bangsa Indonesia. Beda pendapat sah tapi jangan ujar kebencian, fitnah, khususnya memutarbalikkan fakta yang ada," tukasnya.

## Tegur

Seorang menteri sepatutnya menjalankan tugas yang diamanatkan presiden. Presiden mempunyai hak menegur kesalahan menteri. "Saya sebagai menteri, saya itu 'TNI' atau taat nurut instruksi Bapak Presiden Jokowi. Apa kata Presiden 'A' ya 'A'. Sebagai menteri, bisa saja ada kewenangan atau kebijakan saya, kalau ada yang salah yang tegur Presiden," kata Tjahjo.

Hal itu disampaikannya dalam Kaderisasi dan Pendalaman Organisasi Rasa Sejatining Inti Kamanungsan (Rajatikam) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Pengembangan dan Sumberdaya Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/9).

"Sebagai bekas sekjen partai, sekarang anggota, saya taat apa yang diperintahkan Bu Mega (Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri). Sebagai Mendagri saya taat apa yang digariskan Bapak Presiden Jokowi. Enggak boleh menteri beda pendapat dengan Presiden," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, jajaran Kabinet Kerja harus membela Presiden Jokowi. Ditegaskannya, Presiden Jokowi tak akan berbuat salah, termasuk menyelewengkan kebijakan. Berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kini dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla.

Dia mengingatkan, pada 2018, Indonesia memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2019. Pendaftaran calon anggota legislatif, calon presiden dan wapres dimulai 2018. "Tahun ini saja sudah mulai panas ibarat mesin. Pak Jokowi perintahkan pembantunya kerja, karena target kerja kita sampai 20 Oktober 2019," ucapnya. [C-6]